

RAPBD PERUBAHAN SUKOHARJO
Diajukan ke Gubernur



KR-Wahyu Imam Ibad

Penyerahan nota persetujuan bersama Raperda Perubahan APBD Kabupaten Sukoharjo 2023.

SUKOHARJO (KR) - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Tahun 2023 ditandatangani dan disetujui bersama DPRD dan Bupati Sukoharjo. Selanjutnya, hasil persetujuan bersama tersebut disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah.

Bupati Sukoharjo menyampaikan pendapat akhir pada rapat paripurna DPRD dengan acara penandatanganan persetujuan bersama DPRD dan Bupati Sukoharjo. Selanjutnya, hasil persetujuan bersama tersebut disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah.

"Saya dapat menyetujui Raperda Perubahan APBD Tahun 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Sukoharjo," jelas Etik Suryani saat dihubungi Rabu (20/9).

Menurutnya, Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dengan pedoman Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang telah ditandatangani bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD pada hari, Kamis tanggal 31 Agustus 2023.

Selanjutnya, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2023 digunakan sebagai dasar Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan.

"RKA tersebut memuat program, kegiatan dan sub-kegiatan baru. RKA-SKPD merupakan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD; dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023," jelas Etik Suryani.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dimaksudkan memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang mengalami perubahan maupun tidak mengalami Perubahan. (Mam)-f

LPS SERAHKAN BANTUAN DI WONOGIRI

Belasan Ribu Warga Butuh Air Bersih

WONOGIRI (KR) - Kekeruhan air bersih di musim kemarau semakin serius di daerah Kabupaten Wonogiri bagian selatan. Sedikitnya 18.666 jiwa (6.534 KK) yang tinggal di 25 desa/kelurahan tersebar di tujuh wilayah kecamatan kabupaten itu kini kesulitan mendapatkan air minum. Untuk memperoleh air, warga terpaksa membeli eceran dengan harga Rp 150.000 hingga Rp 200.000 pertangki.

Hal tersebut dikemukakan Kalakhar BPBD Kabupaten Wonogiri, Trias Budiyo, pada acara penerimaan bantuan sarana air bersih dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Pusat di Ruang

Girimantik Kompleks Setda Wonogiri, Kamis (21/9). Ikut hadir dalam acara tersebut, Sekda Wonogiri Drs Haryono MM mewakili Bupati Wonogiri Joko Sutopo.

Bantuan sarana penanggulangan kekeringan senilai Rp 150 juta diserahkan secara simbolis Dewan Komisaris LPS Didik Mardiyono kepada Sekda Haryono. Selain berujud material berupa mesin pompa air dan perlengkapan bantuan juga berupa 150 tanki air bersih.

"Karena sifatnya darurat akibat dampak El Nino sebagian bantuan kita wujudkan air bersih dengan armada tanki-tanki, jika masih dibutuhkan ke depan kami siap

tingkatkan bantuan ini," ujar Didik yang putera asli Wonogiri saat ditemui wartawan usai acara.

Untuk wilayah Jawa Tengah, kata Trias Budiono, memang baru Kabupaten Wonogiri yang diintervensi. Tetapi CSR LPS sudah banyak yang dikucurkan ke daerah lain, khususnya wilayah Jawa Barat.

Sekda Wonogiri mengapresiasi bantuan sarpras penanggulangan kekeringan yang diberikan LPS ini kepada daerahnya. Menurut dia, Bupati Wonogiri Joko Sutopo bersama jajaran Pemkab dan DPRD sudah berbuat banyak untuk mengatasi kekurangan air bersih di saat

kemarau secara permanen. "Sudah banyak dusun dan desa/kelurahan yang mendapatkan proyek sarpras untuk memenuhi kebutuhan air

bersih. Yang pasti, kondisinya kini lebih baik ketimbang Wonogiri lima atau sepuluh tahun lalu," tandas Sekda.

(Dsh)-f



KR-Djoko Santoso HP

Dewan Komisaris LPS (kedua dari kiri) menyerahkan bantuan secara simbolis kepada Sekda Wonogiri.

DIIKUTI 60 PESERTA DARI LEMBAGA PEMERINTAH

Banjarnegara Gelar Pelatihan 'Jitupasna'

BANJARNEGARA (KR) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjarnegara menggelar pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna), Rabu (20/9). Pelatihan diikuti 60 peserta dari lembaga pemerintah, kecamatan, perangkat desa, dan tokoh masyarakat. Pelatihan menghadirkan narasumber dari BPBD Kabupaten Cilacap, Basuki Wibowo dan

Hermawan. Para peserta dilibatkan dalam diskusi dan praktik analisa serta kajian (studi kasus bencana), sesuai materi dari narasumber.



KR-Muchtar M

Kalakhar BPBD Banjarnegara Aris Sudaryanto membuka pelatihan Jitupasna di Banjarnegara.

SDM relawan, terutama pascabencana. Sebab, bencana bisa mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis," jelas Aris.

Dikatakan, Jitupasna merupakan kegiatan pengkajian dan penilaian akibat, analisis dampak dan perkiraan kebutuhan pasca bencana, yang menjadi dasar bagi penyusunan aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Lewat pelatihan, kader Jitupasna dilatih untuk melakukan analisis kerugian yang ditimbulkan akibat bencana.

Menurut Aris, dipilihnya narasumber dari BPBD Cilacap, karena BPBD sudah lebih senior dan SDM yang mumpuni, wilayah kerja yang luas, serta ancaman bencana lebih kompleks. "BPBD Cilacap sudah berdiri sejak 2008, dan lembaganya langsung eselon II. Mereka punya banyak pengalaman dengan wilayah kerja luas, serta ancaman bencana lebih kompleks,"

ungkapnya.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Banjarnegara, Tursiman mewakili Penjabat Bupati Banjarnegara mengatakan, wilayah Kabupaten Banjarnegara merupakan daerah rawan bencana. "Ada 266 desa dan 12 kelurahan yang memiliki risiko bencana, terutama tanah longsor dan pergerakan tanah," jelasnya.

Menurut Tursiman, pelatihan sangat tepat sebagai upaya menurunkan tingkat resiko dan meminimalisir dampak bencana mencakup kerusakan, kerugian, serta trauma psikologis para korban bencana. Diharapkan, para peserta dapat menerapkan ilmu Jitupasna di lapangan dengan baik.

"Informasi yang lengkap terkait kerusakan, kerugian, dan kebutuhan pasca bencana begitu berarti bila disampaikan oleh seorang yang memiliki pengetahuan Jitupasna," tandas Tursiman pula.

(Mad)-f

HUKUM

Ayah Bejat Cabuli Anak Tiri

BANJARNEGARA (KR) - Anak di bawah umur penderita keterbelakangan mental, SK (16) warga Desa Binorong RT 01/04 Bawang Banjarnegara, menjadi korban kekerasan seksual ayah tirinya, T (46). Guna mempertanggungjawabkan perbuatan biadabnya, pelaku ditahan di Mapolres Banjarnegara, berikut sejumlah barang bukti. Sedangkan korban SK, mengalami trauma.

Kasat Reskrim Polres Banjarnegara, AKP Bintoro Thio Pratama, Rabu (20/9), mengatakan T dua kali mencabuli korban SK. Kejadian pertama berlangsung pada 10 September 2023. Awalnya, korban bersama ibunya, Sartiyem, sedang di rumah sakit menunggu adik korban yang sedang dirawat. Sekitar pukul 14.00 T datang membesuk.

Beberapa jam kemudian, T mengajak SK pulang membonceng sepedamotor. Sampai di rumah, SK langsung tiduran di kamar. Sekitar pukul 19.00, pelaku memanggil SK masuk kamar yang terletak di sebelah tempat tidur gadis tadi.

"Tanpa curiga, SK mendatangi ka-

mar tersangka T. Di tempat itulah, T kemudian memaksa korban untuk melayani nafsu birahinya," jelas AKP Bintoro.

Korban SK tak mampu melawan. Akibat perbuatan T, korban mengalami kesakitan pada organ vital dan menngis.

Sambil terus menangis, korban kemudian keluar kamar setelah disuruh tersangka T mengenakan pakaian. Pelaku sempat mengancam korban agar jangan menceritakan kejadian tersebut kepada ibu dan adiknya.

Keesokan harinya, keluarga korban curiga melihat perubahan perilaku korban SK. Gadis itu tampak murung dan seperti ketakutan, namun tak mau menceritakan tentang kejadian yang dialaminya.

Setelah didesak, akhirnya SK mengaku dicabuli oleh T. Kemudian keluarga korban lapor polisi. Pelaku akhirnya ditangkap di rumahnya. Lelaki itu terancam hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara, karena dijerat dengan Psal 81 ayat (1) jo Pasal 76D UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Mad)-f

DUGAAN KORUPSI PEMBANGUNAN SMPN 1 WATES

Dituntut 13 Bulan, Terdakwa Merasa Terdzolimi

YOGYA (KR) - Dituntut hukuman 13 bulan penjara, terdakwa SA merasa terdzolimi atas dakwaan serta tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Terdakwa merasa tidak melakukan korupsi dalam proyek relokasi SMP Negeri 1 Wates Kulonprogo.

"Dalam fakta persidangan JPU terlihat ragu merumuskan tuntutan pidana karena terungkap dan terbukti saya bukanlah koruptor. Saya tidak pernah memiliki tujuan dan tidak pernah terbersit untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain apalagi sampai menyalahgunakan kewenangan untuk merugikan negara," ucap SA saat membacakan pledoi (pembelaan) pribadi, di Pengadilan Tipikor Yogya, Kamis (21/9).

Dengan menitikkan air mata dan suara parau menahan tangis, SA menyebutkan dirinya hanyalah seorang istri yang percaya suami bekerja dengan tulus dan seorang ibu yang secara tulus mendidik dan mengajarkan anak-anak berperilaku jujur dan ksatria, sama halnya dengan ibu-ibu lainnya.

"Saya juga merasa takut sejak awal dimulainya rangkaian proses hukum yang dituduhkan kepada saya. Kemudian saya berusaha menguatkan diri saya, menguatkan anak-anak saya, agar cobaan lain cepat selesai dan saran baik saya lakukan termasuk mengembalikan kerugian negara Rp 106.226.000," ungkap SA di depan majelis hakim yang diketuai Vonny Trisaningsih SH MH.

Dalam ketakutan dan kebingungannya saat itu SA bahkan melakukan upaya mengembalikan kerugian negara untuk keduaukalnya ke kas daerah Kabupaten Kulonprogo. "Bukan karena saya merasa salah. Tapi semata-mata

ta agar negara tidak rugi dan saya dapat menjalani kedudukan saya dengan tenang, semuanya ikhlas saya lakukan," ujarnya.

Namun justru oleh Jaksa pengembalian pertama tersebut dijadikan barang bukti. "Padahal jaksa pula yang sebelumnya menyarankan agar saya mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut agar perkara ini selesai," ucapnya parau.

Selanjutnya penasihat hukum terdakwa, Dr M Zaki Mubarrak SH MH, membacakan pledoi ratusan halaman hingga 3 jam lebih dan menyebutkan SA

jelas merasa terdzolimi.

Dibacakan juga pernyataan saksi-saksi di persidangan yang menyebutkan Terdakwa sudah menjalankan pekerjaan dengan baik. "Saksi ahli dari JPU yang membuat klien kami menjadi terdakwa hanya dosen biasa, ternyata tidak memiliki sertifikat ahli gedung. Demikian pula saksi ahli JPU yaitu Inspektorat Daerah juga tidak sesuai standar audit intern pemerintahan. Namun kami tetap taat hukum dan percaya hati nurani majelis hakim, akan memberikan putusan yang adil," tandasnya.

(Vin)-f



KR-Juvintarto

Terdakwa SA didampingi penasihat hukumnya menyampaikan pledoi di depan majelis hakim PN Tipikor Yogya.

CURI KAMBING GUNAKAN MOBIL

2 Residivis Babak Belur Dihajar Massa

WONOSARI (KR) - Dua residivis diduga melakukan pencurian tiga ekor kambing. Dua pelaku masing-masing KA (24) warga Kapanewon Karangmojo dan BG (23) Warga Playen Gunungkidul babak belur dihajar masa saat tertangkap melakukan pencurian kambing milik warga Padukuhan Wuluh Banjarejo, Tanjungsari Gunungkidul, Rabu (20/9).

Aksi pencurian yang dilakukan kedua residivis tersebut dengan menggunakan mobil Honda Brio Nopol G 1905 KB yang diketahui warga ditinggal di pinggir jalan. "Ketiga ekor kambing tersebut dalam keadaan mati dan satu masih hidup," jelas Kapolsek Tanjungsari AKP Wawan Anggoro SH Rabu (20/9).

Sementara salah satu warga sekitar lokasi, Paiman (55) yang melau-

Informasi di lokasi kejadian berdasarkan keterangan salah satu pemilik kambing, Meko (45) warga Wuluh Banjarejo, Tanjungsari Gunungkidul, peristiwa terjadi sekira pukul 03.00 WIB, bermula saat korban mendengar suara anak kambing miliknya dari dalam kandang.

Setelah dilakukan pengecekan ternyata korban mendapati kedua ekor kambing miliknya sudah dikat. Korban lantas berteriak dan minta tolong warga yang kemudian berdatangan ke lokasi. Setelah disisir, warga melihat sebuah mobil jenis Honda Brio Nopol G 1905 KB diduga milik pelaku ditinggalkan di pinggir jalan.

Sementara salah satu warga sekitar lokasi, Paiman (55) yang melau-

kukan pengecekan di kandang juga mendapati 3 ekor kambing miliknya juga hilang. Tidak jauh dari lokasi kandang korban menemukan ketiga kambing miliknya sudah mati.

Atas kejadian tersebut warga langsung melakukan pencarian ke sekitar lokasi yang kebetulan berada di kawasan pegunungan. Sekitar pukul 03.00 WIB keberadaan kedua residivis tersebut diketahui dan langsung dihakimi massa hingga babak belur.

Beruntung kejadian tersebut cepat diketahui polisi dan langsung diamanakan ke Polsek Tanjungsari. "Saat kami interogasi kedua orang tersebut mengaku sebagai pelaku pencurian ketiga ekor kambing," ujarnya. (Bmp)-f